

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

- 1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 19 Februari 2024 Yang Menyatakan,

> Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama



Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan:

- 1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 27 Agustus 2024 Yang Menyatakan,

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Human Capital & Umum



Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan:

- 1.Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6.Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 27 Agustus 2024 Yang Menyatakan,

Pramudya Iriawan Buntoro Direktur Kepesertaan



Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan:

- 1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 19 Februari 2024

Yang Menyatakan,

Roswita Nilakurnia Direktur Pelayanan



Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan:

- 1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 27 Agustus 2024 Yang Menyatakan,

Asep Rahmat Suwandha

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan:

- 1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5.Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6.Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 27 Agustus 2024 Yang Menyatakan,

Direktur Perencanaan Strategis dan TI



Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan:

- 1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
- 2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- 4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
- 5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- 6. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Governance*).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 19 Februari 2024 Yang Menyatakan,

Edwirmichael Ridwan

Direktur Pengembangan Investasi